

MENEGUHKAN KEMBALI NILAI-NILAI PANCASILA DALAM KONTEKS KEKINIAN

Cevi Mochamad Taufik¹, Heni Haryani²

^{1,2}Universitas Kebangsaan Republik Indonesia

cevimochamadtaufik@ukri.ac.id, heniharyani@ukri.ac.id

Abstract: *The national spirit must always live on in all phases of era development. Its importance is not merely to emphasize national identity, but as the most essential manifestation of Indonesianness. It is inconceivable that if the national identity is lost and replaced by foreign values, then gradually the characteristics of Indonesia will be lost or at least will not have a character that shows its identity in world relations. In reality, the tendency in this direction is getting stronger amidst the influx of foreign culture which permanently intrudes into all sectors of life. This includes the struggle for values brought by foreign nations as well as the agenda of world nations who are trying to become a force to subdue other nations. Also unavoidable is the power of the cronies of the superpowers who are only oriented towards business and profit without recognizing the boundaries of nationalism. Facing conditions like this, national awareness must always be fostered and become a source of pride and directed in the form of internalizing values within every member of the nation. In this regard, the study was structured as an effort within the framework of bringing national values to life. Through the method of observing developments in the national situation, literature studies adapted from materials spread across various internet networks are strengthened as data that strengthens the analysis. The result is that national values must be embedded in every citizen of the nation with the practice of the principles of Pancasila as the strengthening basis that unites Indonesia.*

Keyword: National identity, values, nationalism

Abstrak: Spirit kebangsaan harus selalu hidup pada semua fase perkembangan zaman. Kepentingannya bukan semata untuk menegaskan identitas nasional, namun sebagai wujud paling hakiki mengenai rupa keindonesiaan. Tidak dapat dibayangkan jika jati diri bangsa sirna tergantung nilai-nilai asing, maka lambat laun ciri Indonesia hilang atau setidaknya tidak memiliki karakter yang menunjukkan jati diri dalam kiprah pergaulan dunia. Realitasnya, kecenderungan ke arah sana semakin kuat di tengah derasnya budaya asing yang secara permanen mengintrusi semua sektor kehidupan. Termasuk di dalamnya pertarungan nilai-nilai yang dibawa bangsa-bangsa asing serta agenda bangsa-bangsa dunia yang berusaha menjadi kekuatan untuk menundukkan bangsa-bangsa lainnya. Tidak bisa dihindarkan pula adalah kekuatan para kroni negara adidaya yang hanya berorientasi pada bisnis dan keuntungan tanpa mengenal batas-batas nasionalisme. Menghadapi kondisi seperti ini, kesadaran kebangsaan harus senantiasa ditumbuhkan dan menjadi kebanggaan serta diarahkan dalam bentuk internalisasi nilai-nilai ke dalam diri setiap warga bangsa. Berkaitan dengan ini, kajian disusun sebagai sebuah upaya dalam kerangka menghidupkan nilai-nilai kebangsaan. Melalui metode observasi atas perkembangan situasi kebangsaan diperkuat studi literatur yang diadaptasi dari bahan-bahan yang tersebar di berbagai jaringan internet sebagai data yang menguatkan analisis. Hasilnya adalah nilai-nilai kebangsaan harus tertanam dalam diri setiap warga bangsa dengan pengamalan atas sila Pancasila sebagai dasar penguat yang mempersatukan Indonesia.

Kata Kunci: Identitas nasional, nilai, nasionalisme

PENDAHULUAN

Setiap bangsa akan berdinamika menyelaraskan dengan dimensi dan arah perkembangannya. Pada situasi yang terjadi dapat menyebabkan berbagai perubahan dalam penguatan nilai-nilai nasional atau sebaliknya dapat melunturkan identitas bangsanya sendiri. Ini sangat tergantung pada bagaimana sebuah bangsa dapat menumbuhkan dan menyadarkan warganya kepada jati diri yang menjadi hakikat dan ciri khas bangsanya. Jati diri yang membedakan antara satu bangsa dengan bangsa lainnya adalah identitas nasional sebagai penanda, corak, karakteristik dan sifat yang dapat membedakan suatu bangsa dari bangsa lainnya (Aulia et al., 2021).

Begitupun dengan Indonesia. Hakikat identitas nasional Indonesia adalah Pancasila yang diaktualisasikan dalam berbagai kehidupan berbangsa. Aktualisasi ini untuk menegakkan Pancasila dan UUD 1945 sebagaimana dirumuskan dalam pembukaan UUD 1945 terutama alinea ke-4 (Latra, 2017). Pancasila yang membedakan Indonesia dengan negara lain di dunia, dipilih sebagai dasar negara yang diperlukan untuk menjaga eksistensi bangsa Indonesia. Di dalam setiap sila Pancasila pasti terkandung nilai-nilai luhur bangsa Indonesia yang sesuai dengan kepribadian bangsa dan negara (Agus, 2015) (R. Sari et al., 2022). Sebagai sistem nilai, Pancasila menapasi gerak keindonesiaan yang mengarahkan pada perwujudan cita-cita nasional.

Akan tetapi, dalam perjalanan mewujudkan kebangsaan Indonesia menghadapi tantangan tidak ringan. Globalisasi adalah salah satunya. Nilai global yang berusaha menjadi identitas dunia secara konsisten mempengaruhi dan menyentuh pada lapisan paling dasar sendi kehidupan berbangsa. Bukan tidak mungkin akan memunculkan gelombang perubahan secara luas dan menyentuh pada sisi paling hakiki yakni, karakter bangsa (Hendrastomo, 2007). Pengaruh yang terjadi adalah perubahan nilai yang merupakan suatu kualitas atau penghargaan terhadap sesuatu, yang dapat menjadi dasar penentu tingkah laku seseorang (Fathurrohman, 2022). Pada tataran riilnya, semula sebuah bangsa menganut nilai-nilai yang sesuai dengan jati diri dan kepribadiannya, namun berubah ke arah nilai yang sama sekali berbeda. Ini sebagai dampak persilangan nilai akibat interaksi dengan nilai-nilai dari budaya yang berbeda. Menurut Munn (1962) nilai lebih merupakan aspek keribadian, sesuatu yang dipandang baik, berguna atau penting dan memiliki bobot tertinggi bagi seseorang (Adisubroto, 1993). Nilai-nilai yang sudah terbentuk dan terinternalisasi dalam diri warga bangsa akan mengalami perkembangan (Sukitman, 2016).

Sesuai dengan proses hidup yang terus berjalan, nilai-nilai akan berubah mengikuti arus zaman. Nilai akan terus dipertukarkan karena setiap orang berinteraksi dan berkomunikasi membangun hubungan untuk mendapatkan penghargaan, dan tetap tinggal dalam suatu hubungan yang lebih banyak memberikan penghargaan daripada biaya dan lebih banyak memberikan penghargaan daripada alternatif. (Julia T. Wood, 2004) (W. P. Sari, 2018). Meski pada setiap proses komunikasi terjadi saling pengaruh, maka akan menjadi sebuah ukuran atau standar yang digunakan untuk menakar dan menegaskan nilai diri dari pihak-pihak yang terlibat dalam komunikasi. Terjadi perubahan atau penyesuaian nilai yang dimiliki diri sendiri kepada nilai yang dimiliki lawan komunikasi. Proses perubahan ini kemungkinan akan menyentuh pada semua segi. Tidak terkecuali pada nilai-nilai dasar yang melandasi fundamental bangsa.

Gerak perubahan tidak hanya berlangsung dalam satu putaran tertentu dan hanya menyentuh hanya pada satu lapisan saja, melainkan datang bersamaan menerpa pada semua lapisan masyarakat. Pada waktu bersamaan internalisasi nilai-nilai terjadi baik yang berasal dari nilai lokal maupun nilai dari budaya luar (Wahyuni, 2011). Peristiwa inilah yang kini menjadi gambaran bangsa Indonesia. Sebagai sebuah himpunan besar, Indonesia memiliki nilai-nilai dasar sebagai jati diri dan kepribadian yang menjadi ciri bangsa. Nilai yang terangkum dalam Pancasila mencakup dasar perilaku berbangsa dan bernegara. Sila-sila

dalam Pancasila merupakan kesatuan yang bulat dan utuh, hierarkhis dan sistematis. Sehingga kelima sila ini tidak terpisah-pisah dan mengandung makna sendiri-sendiri, melainkan memiliki esensi serta makna yang utuh. Dalam konteks yang demikianlah pengertian sila-sila Pancasila merupakan suatu sistem filsafat (Kaderi, 2015).

Pada situasi yang terjadi, maka praktik penanaman nilai-nilai kebangsaan tidak akan menemui jalan akhir, namun akan terus berlangsung selama negara ada. Kepentingan berkenaan dengan praktik penanaman ini adalah transfer dan pewarisan nilai kepada seluruh warga bangsa, terutama para generasi penerus agar memiliki pemahaman dan kepercayaan terhadap eksistensi dirinya. Tujuan yang ingin dicapai terjadinya penguatan hingga membentuk ketahanan nilai-nilai kebangsaan. Ketahanan nasional harus diutamakan sebagai bagian dalam upaya penguatan nilai-nilai kebangsaan. Hakikatnya ketahanan nasional adalah kondisi suatu bangsa yang menggambarkan kemampuan mengatasi segala macam ancaman, tantangan, hambatan, gangguan dan tantangan. Faktor penguat ketahanan nasional yaitu ideologi, politik, sosial budaya, ekonomi dan pertahanan keamanan. Sosial budaya sebagai salah satu faktor penguat ketahanan nasional, maka dalam pembangunannya tidak dapat lepas dari kondisi objektif masyarakat Indonesia yaitu masyarakat yang multikultural (Widiuseno, 2020).

Tantangan lain adalah terjadinya peralihan generasi yang selalu memberi kekuatan untuk menentukan langkah menuju masa depan. Toqueville (Branson, 1998:2) menyebut: setiap generasi adalah masyarakat baru yang harus memperoleh pengetahuan, mempelajari keahlian, dan mengembangkan karakter atau watak publik maupun privat yang sejalan dengan demokrasi konstitusional. Sikap mental ini harus dipelihara dan dipupuk melalui perkataan dan pengajaran serta kekuatan keteladanan (Budimansyah, 2010). Alih generasi adalah fase hidup yang berlangsung secara alami. Sebuah generasi yang telah mencapai pada fase tertentu akan disusul generasi selanjutnya. Setiap generasi adalah masyarakat baru yang harus memperoleh pengetahuan, mempelajari keahlian, dan mengembangkan karakter atau watak publik maupun privat yang sejalan dengan demokrasi konstitusional (Tampake, 2014). Para pendahulu biasanya telah memiliki keajegan terhadap nilai-nilai yang dianutnya.

Bahkan memiliki kesadaran untuk menyatakan kebangsaannya. Berbeda dengan generasi muda pelanjut yang mengalami banyak percampuran nilai, terutama karena interaksinya dengan budaya barat. Sehingga jiwa sosialnya luntur dan hanya mengutamakan kepentingannya (Yudistira:2016) (Dilla Khansa et al., 2022). Tidak adanya bela negara maka penyadaran kebangsaan pada generasi muda memerlukan upaya ekstra. Disadari bahwa pada fase ini tergolong dalam masa pencarian terutama berkenaan dengan karakter yang akan membentuk jati dirinya. Di masa ini juga tebaran pengaruh datang dengan deras dan terus menyimpannya untuk menentukan sikap dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Meski begitu, persoalan ini bukan semata domain kalangan muda, namun sejumlah kalangan yang telah berkategori senior sekalipun kerap kesulitan ketika akan menjelaskan nilai kebangsaan. Tidak sedikit yang mengalami kesulitan karena suatu hal bisa lupa atau karena ketidaktahuan. Pada fase ini bukan berarti tidak penting, akan tetapi agar mampu mewariskan kepada generasi penerus. Karena untuk itu, komitmen kebangsaan harus tuntas dan menyeluruh. Berlaku bagi semua golongan, strata, dan lapisan sosial tanpa membeda-bedakan perlakuan. Kewajibannya bukan hanya pada satu pihak saja, melainkan berlaku juga untuk pihak-pihak lain yang tergolong sebagai warga bangsa.

TINJUAN PUSTAKA

Pancasila sebagai penguat pemersatu bangsa menjadi fundamen yang mampu menegakkan Indonesia. Pancasila juga sebagai landasan kokoh yang menegaskan ciri keindonesiaan dan menjadi pedoman perilaku bagi seluruh warga bangsa. Pada proses

penemuannya, Pancasila besumber pada hakikat sifat kodrat kemanusiaan sebagai makhluk individu dan makhluk sosial (Ridhuan & Ningsi, 2019). Sejak ditetapkan sampai 78 tahun Indonesia merdeka, penanaman nilai-nilai Pancasila sempat mengalami pasang surut. Dalam sebuah fase tertentu, pernah mengalami situasi kesadaran berbangsa dan bernegara yang sangat tinggi mengingat perubahan kekuasaan sebelumnya cenderung mendistorsi penanaman Pancasila. Fase berikutnya, dihindangi perasaan tak tentu berkeanaan dengan sebuah rezim yang mendeklarasikan Pancasila sebagai bangunan keindonesian namun pada kenyataannya berkontradikasi. Ini karena Pancasila hanya ditempatkan sebagai lambang yang jauh dari aktualisasi (Latif, 2015). Kegamangan ini membuat warga terarah fokus hanya pada upaya pembangunan kembali hingga secara ekstrem melupakan nilai dasar dalam lima sila yang termaktub sebagai falsafah hidup bangsa.

Pada fase ini, terutama ketika era modernisasi, Pancasila yang merupakan intisari nilai-nilai kebangsaan harus bersaing merebut posisi di hati masyarakat. Bersamaan dengan modernisasi, liberalisasi menyemaikan nilai-nilainya. Tak terhindarkan terjadinya asimiliasi atau percampuran nilai-nilai yang akhirnya menyatu dan menjadi cara dalam berhubungan dengan orang lain. Percampuran terjadi dengan berat pada nilai lokal atau sebaliknya, nilai asing yang lebih mendominasi dan menjadi panduan dalam bertingkah laku. Dalam konteks ini, nilai-nilai kebangsaan itu telah luntur oleh gerusan modernitas deras menerpa bagai gelombang. (Sekretariat MPR RI, 2012).

Modernisasi nilai dan nilai-nilai modern yang asing bertebaran dalam lingkup pergaulan bangsa hingga berpotensi menggeser karakter asli bangsa ini. Banyak hal menarik yang dianggap menjadi pemikat untuk diterapkan dalam kiprah keseharian para anak bangsa. Lambat laun, ketika mulai terinternalisasi dalam diri para penganutnya secara otomatis akan tercerabut manusia Indonesia dari akar dan jati dirinya. Indonesia yang berbudaya akan kehilangan jati diri, karakter yang menjadi branding bangsa pun hilang. Segi praktis dalam gaya dan cara hidup yang ditawarkan seolah mampu mengubah kultur dan kebiasaan. Ini menunjukkan karakter yang hanya mengikuti tren dan kecenderungan global. Jika ini terjadi, maka dalam lingkup pergaulan dunia tidak ada ciri yang menunjukkan keindonesiaan, semuanya sama bahkan cenderung mengidentikan dengan identitas dan karakter bangsa-bangsa lain. Pada fase ini mungkin saja telah terjadi peniruan yang pada akhirnya mengubah secara fundamental.

Apabila dibiarkan tanpa kendali tentu akan sangat membahayakan. Bahkan akan lebih bahaya lagi apabila komitmen dari para pemimpin bangsa mengendur dan membiarkan persoalan melunturnya komitmen kebangsaan ini. Instrumen pengendali yang kuat akan menempatkan nilai-nilai kebangsaan berjalan pada posisinya dan secara aktual termanifestasikan. Termasuk di dalamnya komitmen para pemimpin bangsa dalam memperlakukan diri dan lingkungannya. Harus mampu mengerem dan mengendalikan diri agar tidak terperangkap pada peragaan kemewahan sedangkan komponen yang digunakan sebagai alat peraga kemewahan tersebut adalah barang-barang impor. Dalam hal ini tentu saja menimbulkan pertanyaan dari masyarakat berkenaan dengan komitmen kebangsaannya. Sebab bagaimana bisa menghargai karya bangsanya sendiri, jika para pemimpin lebih mengutamakan kepentingannya dengan melakukan cara-cara yang menyimpang dari nilai-nilai Pancasila.

Hal yang sama berlaku pada komitmen dalam memajukan bangsa. Kemajuan yang diinisiasinya tidak sekadar perkataan kosong yang hanya mengharuskan rakyat cinta pada bangsanya, namun para pemimpin bangsa melenggang dengan pandangan dirinya yang memasuki dunia dengan segala cap yang dibawanya berunsurkan paham global. Sesungguhnya, aturan yang diberlakukan ini adalah hukum sosial berupa pemaksaan kehendak dengan memberlakukan pada orang lain dan tidak pada dirinya sendiri. Maksudnya, orang lain, apalagi yang tingkat sosial ekonominya rendah, harus tercatat sebagai penghayat dan pengamal Pancasila, sementara mereka merasa tidak perlu diragukan

mengenai komitmen kebangsaannya. Sebagai ideologi, Pancasila harus menjadi jiwa yang menginspirasi seluruh pengaturan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara (Laura & Rahman, 2023).

Tidak ada kecuali, namun berlaku pada seluruh warga Indonesia dari berbagai kalangan usia, agama, golongan, dan kategorisasi lain yang mengeratkan dan menguatkan ikatan di antara anggota masyarakat. Karena itu sudah menjadi konsekuensi yang harus dimiliki semua orang untuk secara konsekuen meresapi, menghayati, dan mengamalkan secara baik dan benar dalam berbagai situasi yang dihadapi.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian studi literatur (study of literature). Studi literatur digunakan dengan cara mengumpulkan data melalui berbagai bacaan dan kemudian melakukan penelaahan terhadap literatur-literatur yang telah dipublikasikan baik secara nasional maupun internasional, yang berhubungan dengan permasalahan yang berkaitan dengan topik yang menjadi pangkal penelitian. Dalam praktiknya, peneliti tidak hanya mengumpulkan, membaca, dan mencatat literatur saja, lebih dari itu beraktivitas dengan cara memperhatikan atau mengobservasi berbagai situasi yang relevan dengan masalah penelitian. Langkah-langkah dalam melakukan studi literatur yaitu harus memperhatikan metode penelitian untuk mengumpulkan data, membaca dan mengolah bahan pustaka serta peralatan yang harus dimiliki dan dipersiapkan untuk memudahkan peneliti dalam memperoleh data.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Agenda mendasar bangsa adalah menyebarkan nilai-nilai Pancasila kepada segenap warga bangsa. Tujuannya agar menumbuhkan kesadaran berkebangsaan hingga tertanam dan terbentuk dalam diri hingga menjadi way of life. Realitas kini menunjukkan kondisi yang sebaliknya. Nilai-nilai Pancasila “alpa” dalam sebagian sanubari warga bangsa. Bahkan pengaruh kuat dari nilai-nilai barat, melenakan orientasi dan melupakan hakikat yang menjadi ciri dan kepribadian bangsa.

Bukan tidak mungkin Pancasila hanya merupakan hapalan saja yang sulit untuk diimplemenasikan, dan dianggap bukan kewajiban yang harus tumbuh dalam sanubari seluruh warga bangsa. Pengimplementasiannya seolah merupakan tanggung jawab kelompok tertentu saja. Terutama mereka yang berprofesi sebagai aparatur pemerintahan. Dengan anggapan seperti itu, muncul adagium bahwa kelompok masyarakat yang kecil ini yang bertindak mewakili bagian terbesar masyarakat. Sehingga kewajiban untuk berjiwa Pancasila dan melaksanakan seluruh sila Pancasila hanya merupakan tanggung jawab kelompok kecil tersebut. Dapat juga terjadi kenyataan bahwa penghapal Pancasila tidak mencapai seluruh jumlah penduduk, namun hanya bagian tertentu saja.

Selaras dengan itu, gambaran yang mengkhawatirkan mengenai penanaman nilai Pancasila terungkap melalui survei yang dilakukan SMRC (Saiful Mujani Research Centre). Survei yang dilakukan jelang hari kesaktian Pancasila 1 Juni 2022 ini, menunjukkan hanya 64,6 persen dari publik yang hapal semua Pancasila (Survei SMRC: Hanya 64,6% Publik Hafal Semua Sila Pancasila, Dengan jumlah tersebut, 35,4 persen tidak hapal sila Pancasila. Jika dihitung dari seluruh penduduk Indonesia yang menurut BPS jumlah penduduk Indonesia tahun 2023 berjumlah 278, 69 juta jiwa. terdapat sebanyak 98,65 juta penduduk Indonesia tidak hapal Pancasila.

Jumlah Penduduk	278,69 juta jiwa
Hapal Pancasila	64,6 persen
Tidak Hapal Pancasila	35,4 persen

Sumber: www.beritasatu.com

Tabel 1
Jumlah rakyat yang hapal dan tidak hapal Pancasila

Berdasarkan tabel tersebut menunjukkan bahwa pemahaman nilai-nilai Pancasila tidak menyentuh seluruh warga bangsa. Terdapat banyak masyarakat yang lupa atau tidak hapal. Gambaran ini menunjukkan bahwa bangsa ini harus secara spartan dan masif untuk menggeloarkan dan meneguhkan kembali nilai-nilai Pancasila. Meski sebenarnya, penanaman nilai-nilai Pancasila ini seharusnya sudah tuntas dan final dan yang perlu dilakukan adalah pada praktik dan pengamalannya. Namun kenyataan menunjukkan lain, di sebuah tempat yang menjadi bagian negeri ini terjadi peristiwa yang memalukan. Seorang oknum anggota kepolisian tidak hapal teks dari sila Pancasila. Ini sebagaimana yang terjadi akhir-akhir ini hingga menjadi viral di berbagai jaringan media sosial mengenai video anggota polisi Cilacap tidak hapal Pancasila, sebagai konsekuensinya polisi tersebut dicopot. Buntut tak hapal Pancasila, Polisi Cilacap Dicopot. Ini kondisi yang sangat mengkhawatirkan, karena seharusnya aparat keamanan sudah paraipurna dalam penghayatan dan pengalamannya. Tindak-tanduk dan perilakunya mencerminkan masing-masing sila dari Pancasila.



Sumber: detik.com

Gambar 1
Video polisi yang tidak hapal Pancasila

Kondisi ‘ketiadaan’ Pancasila dalam diri warga bangsa semestinya tidak terjadi. Terlebih dengan semua upaya untuk memahami dan setidaknya agar senantiasa menjadi ingatan seluruh warga bangsa sudah ditempuh secara berjenjang, dari mulai pendidikan tingkat dasar hingga perguruan tinggi. Apalagi, aparat kepolisian sebagai penjaga keamanan nasional yang tentu saja berperan sebagai penjaga agar falsafah Pancasila senantiasa hidup dan mampu mengingatnya dalam memori. Bahkan aparat kepolisian menjadi salah satu komponen yang mendirikan dan menghidupkannya. Karena ini merupakan komitmen yang disadari dan diyakini sudah terbentuk dan menjiwai dalam gerak dan tindak tanduk. Aparat selayaknya bertindak benar agar menjadi panutan bagi seluruh warga bangsa, dengan salah satunya menunjukkan diri sebagai pribadi yang senantiasa menghidup-hidupkan Pancasila, mengaplikasikannya dalam tingkah keseharian.

Ini merupakan cita ideal dalam kerangka mewujudkan kehidupan bangsa yang bernuansa Pancasila. Namun selama bangsa ini berdiri, penanaman nilai Pancasila masih berproses pada sebagian besar warga dan pada sebagiannya masih jauh dari harapan. Ini salah satunya karena praktik yang ditunjukkan sebagian pemimpin bangsa yang dengan tega merampok uang negara melalui cara-cara korup. Anehnya, mental korup ini nyaris merata pada semua pemimpin yang memiliki kesempatan duduk di kursi kepemimpinan negara. Dengan kata lain, korupsi terjadi dengan tidak mengenal partai, latar belakang intelektual, suku, dan agama. Ketika memiliki kesempatan untuk melakukannya, maka praktik korupsi merajalela dengan jumlah uang yang dikorupsi semakin banyak. Sebagai extraordinary crime, tindak korupsi sebenarnya harus musnah di negeri Pancasila ini.

Sila dalam Pancasila semuanya menentang keras praktik korup para para oknum penyelenggara negara dengan tendensi menyelenwengkan kepercayaan rakyat. Sila pertama berbunyi tentang ketuhanan, sudah barang tentu menunjukkan keyakinan ketuhanan yang ditunjukkan dalam kehidupan beragama. Sebagai bentuk moral, agama sangat menentang keras perbuatan yang menggerogoti keuangan negara ini. Begitupun sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Merujuk pada nilai di sila kedua ini, perbuatan korupsi sangat bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Perilaku korup sangat merugikan hak masyarakat untuk mendapatkan bagian yang ditawarkan negara. Pelaksanaan hak ini termasuk dalam upaya untuk memperkembangkan diri warga bangsa agar berdaya dan mampu berpartisipasi dalam pembangunan bangsa.

Pada sila ketiga persatuan Indonesia, menunjukkan bahwa perilaku korupsi dilakukan dengan cara berkomplot untuk mencuri kekayaan negara yang tujuannya bagi kepentingan kelompoknya saja. Sementara nilai-nilai persatuan tidak menjadi dasar untuk tumbuh secara bersama dalam kerangka yang lebih luas, yakni keindonesiaan. Begitupun dengan sila keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan jarang dipraktikkan sebagai nilai dasar yang menunjukkan keindonesiaan. Pada bentuk yang terakhir atau sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, masih harus diperjuangkan agar benar-benar dapat terimplementasikan, karena pada kenyataannya menegakkan keadilan baru sebatas pernyataan yang tidak ada habisnya dan terus diucapkan oleh pihak-pihak tertentu. Sementara kenyataannya menunjukkan situasi sangat berbeda dengan yang dinyatakan.

Penghayatan yang utuh dan lengkap tentang Pancasila memungkinkan bangsa ini terhindar dari segala praktik dan pengaruh dari anasir-anasir buruk yang berpotensi menggerogoti bangunan kebangsaan. Dengan Pancasila praktik menggerogoti anggaran negara dengan beramai-ramai melakukan korupsi dapat dicegah, karena Pancasila sangat menentang perbuatan tersebut. Hal yang sama juga terjadi pada aksi-aksi intoleran yang dilakukan sekelompok masyarakat dengan memaksakan nilai-nilai kelompoknya kepada pihak lain tidak akan terjadi. Begitupun aksi-aksi terorisme yang merugikan bangsa tidak

mendapat tempat untuk hidup. Dengan beragam manfaat yang merupakan esensi dari Pancasila, sudah seharusnya nilai-nilai tersebut dihidupkan pada semua fase berbangsa dan bernegara. Terlebih pada situasi saat ini ketika berbagai tantangan dalam menegakkan keindonesiaan mengalami hambatan yang sangat fundamental, maka Pancasila menjadi sangat relevan. Tantangan yang menyebabkan bersatunya negara ke dalam kesatuan global, terbentengi dengan setidaknya menegakkan nilai-nilai dasar yang terdapat di dalam Pancasila.

KESIMPULAN

Pancasila harus menjadi spirit yang tiada lelah untuk dihidupkan. Sekali saja hilang dari agenda bangsa, berbagai kasus pencederaan terhadap Pancasila terjadi. Lupa atau tidak hapal merupakan sebuah bentuk kewajaran akan tetapi jika jumlah orang yang lupa atau tidak hapal Pancasila sangat banyak, maka merupakan sebuah kondisi bahayalupa dan tidak hapal terjadi pada aparat keamanan. Tentu ironis karena anggota polisi dipandang sebagai pihak yang berperilaku dan bertindak berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Begitupula dengan para pemimpin bangsa yang sedang berkuasa kerap melupakan nilai-nilai Pancasila dengan mengutamakan perbuatan menyimpang dengan melakukan korupsi. Sebagai nilai luhur bagi bangsa ini, tentu saja Pancasila harus menjadi pijakan, landasan, dan pedoman yang membimbing perilaku dan tindak-tanduk seluruh warga bangsa.

UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan dimuatnya artikel hasil pengamatan ini, kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada para pengurus jurnal JKRI. Terima kasih juga kami sampaikan kepada pihak-pihak yang telah membantu dan tidak bisa kami sebutkan satu per satu namanya, hingga naskah ini selesai.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisubroto, D. (1993). NILAI: SIFAT DAN FUNGSINYA. *Buletin Psikologi*, 2(1), 28–33.
- Aulia, L. R., Dewi, D. A., & Furnamasari, Y. F. (2021). Mengenal Identitas Nasional Indonesia Sebagai Jati Diri Bangsa untuk Menghadapi Tantangan di Era Globalisasi. *Jurnal Pendidikan Tambuasi*, 5(3), 8549–8557.
- Budimansyah, D. (2010). TANTANGAN GLOBALISASI TERHADAP PEMBINAAN WAWASAN KEBANGSAAN DAN CINTA TANAH AIR DI SEKOLAH. *Jurnal Penelitian Pendidikan*, 11(1), 1–7.
- Dilla Khansa, S., Dinie, & Dewi, A. (2022). GENERASI MILENIAL SEBAGAI PENERUS BANGSA DALAM PERSPEKTIF NILAI NILAI PANCASILA. *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(1).
- Fathurrohman. (2022). NILAI DAN NORMA.
- Hendrastomo, G. (2007). Nasionalisme vs Globalisasi “Hilangnya” Semangat Kebangsaan dalam Peradaban Modern. *DIMENSIA*, 1(1).
- Kaderi, A. (2015). *PENDIDIKAN PANCASILA UNTUK PERGURUAN TINGGI (Vol. 1)*. Latif, Y. (2015). *REAKTUALISASI PANCASILA*.
- Latra, I. W. (2017). IDENTITAS NASIONAL SEBAGAI SALAH SATU DETERMINAN DALAM PEMBANGUNAN BANGSA DAN KARAKTER.

- Laura, C. P., & Rahman, A. (2023). Empat Pilar Kebangsaan Indonesia. *PINISI, JOURNAL OF ART, HUMANITY & SOCIAL STUDIES*, 3(2), 194–201. <http://www.google.com>
- Ridhuan, S., & Ningsi, R. (2019). PERBANDINGAN IDEOLOGI PANCASILA DENGAN IDEOLOGI LAIN.
- Sari, R., Ulfatun Najicha, F., & Artikel, I. (2022). MEMAHAMI NILAI-NILAI PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA DALAM KEHIDUPAN MASYARAKAT. *Harmony*, 7(1), 53–58. <http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/harmony>
- Sari, W. P. (2018). STUDI PERTUKARAN SOSIAL DAN PERAN NILAI AGAMA DALAM KERUKUNAN ANTARKELOMPOK UMAT BERAGAMA DI MANADO. *Jurnal Komunikasi*, 11(1), 96–105.
- Sekretariat MPR RI. (2012). EMPAT PILAR KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARA (Vol. 1).
- Sukitman, T. (2016). INTERNALISASI PENDIDIKAN NILAI DALAM PEMBELAJARAN (UPAYA MENCIPTAKAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERKARAKTER). *Jurnal Pendidikan Sekolah Dasar*, 2(2), 86–96.
- Tampake, T. (2014). Tantangan Globalisasi terhadap Nilai-nilai Keindonesiaan. *Theologia, Jurnal Teologi Interdisipliner*, 1–12.
- Wahyuni. (2011). PERUBAHAN SISTEM NILAI DAN BUDAYA DALAM PEMBANGUNAN. *Sulesana*, 6(2), 206–215.
- Widisuseno, I. (2020). KETAHANAN NASIONAL DALAM PENDEKATAN MULTIKULTURALISME. 1–8.